

TINJAUAN KESEJARAHAN PANAI BERDASARKAN SUMBER TERTULIS

THE STUDY OF PANAI HISTORIOGRAPHY BASED ON WRITTEN SOURCES

Naskah diterima:
05-02-2018

Revisi terakhir:
10-04-2018

Naskah disetujui terbit:
20-04-2018

Ambo Asse Ajis

Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh

Jl. Meulaboh - Banda Aceh, Rima Jeuneu, Peukan Bada,
Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23351

Abstract

Panai is mentioned in the Tanjore inscription (1030 AD), Nagarakertagama (1365 M) pupuh XIII verse 1, and the Armenian travel record, entitled "Names of Indian Cities and Persian Suburbs" (circa 1667 AD). The written source above does not explain Panai's position as a kingdom or just a bookie. The purpose of this paper is to look at the position of historiography of Panai based on the three written sources above and give a new perspective on the position of Panai as an empire or just a trade port. The method used is descriptive qualitative by utilizing written data such as inscriptions, old books, and records of ancient trips. Besides being a trading port, Panai also developed as a kingdom with local authorities recognized by Sriwijaya, Malayupura, Colamandala, and Majapahit.

Keywords: Panai, bandar, Tanjore Inscription, Nagarakertagama

Abstrak

Panai disebutkan pada prasasti Tanjore (1030 M), *Nagarakertagama* (1365 M) pupuh XIII bait 1, dan catatan perjalanan berbahasa Armenia, berjudul "*Nama Kota-Kota India dan Kawasan Pinggiran Persia*" (sekitar tahun 1667 M). Sumber tertulis di atas tidak menjelaskan kedudukan Panai sebagai kerajaan atau sekadar bandar saja. Tujuan penulisan ini adalah melihat kedudukan historiografi Panai berdasarkan tiga sumber tertulis di atas dan memberi perspektif baru atas kedudukan Panai sebagai sebuah kerajaan atau hanya bandar dagang. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan memanfaatkan data-data tertulis seperti prasasti, kitab lama, dan catatan perjalanan kuno. Panai selain sebagai bandar perdagangan juga berkembang sebagai kerajaan dengan penguasa setempat yang diakui oleh Sriwijaya, Malayupura, Colamandala, dan Majapahit.

Kata kunci: Panai, bandar, Prasasti Tanjore, Nagarakertagama

PENDAHULUAN

Penyebutan Panai, salah satunya ditemukan dalam Prasasti Tanjore berbahasa Tamil berangka tahun 1030 Masehi. Prasasti itu dibuat oleh Rajendra Cola I dari Dinasti Colamandala yang berada di Koromandel, India Selatan (Suhadi 2012, 136). Salah satu baris pada prasasti tersebut menyebutkan penaklukan Sriwijaya dan wilayah lain yang salah satunya Pannai dengan "kolam

airnya". Kalimat tersebut sarat makna dan pengertian yang luas.

Kedua, terdapat dalam catatan *Kitab Nagarakertagama* (1365 Masehi) pupuh XIII bait 1, salah satu karya sastra dari kerajaan Majapahit, yang menyebutkan *Pane* (Panai) termasuk salah satu wilayah yang ditafsirkan memberikan "upeti" kepada Majapahit (Tim Redaksi, 2013; Suhadi 2012, 136).

Selanjutnya, penyebutan ketiga tentang Panai (*P'anes*), terdapat di naskah asing yaitu catatan perjalanan berbahasa Armenia, berjudul *Nama Kota-Kota India dan Kawasan Pinggiran Persia*. Menurut Avramian (1958 dalam Kevonian 2014, 39) catatan perjalanan itu dibuat sekitar tahun 1106 - 1161 Masehi. Catatan ini diterbitkan tahun 1668 Masehi di Amsterdam dan tahun 1882 Masehi diterbitkan dengan terjemahan bahasa Perancis Masehi (Kevonian 2014, 37).

Dari gambaran 3 (tiga) referensi historis di atas, penulis memberikan informasi tentang Panai (*P'anes*), antara lain: *Pertama*, kedudukan Panai sebelum abad X Masehi telah dikenal dalam lansekap Asia Tenggara. Diyakini Panai ketika itu merupakan bagian dari salah satu tempat yang terkoneksi dengan dunia global Asia Tenggara dan Asia daratan karena memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh jaringan kemaritiman. Kedudukannya yang sejajar dengan negeri-negeri lain dalam prasasti Tanjore menjadi sinyal kuat kedudukan historisnya yang sangat penting sebelum abad X Masehi atau sebelum diserang oleh pasukan Colamandala.

Pentingnya kedudukan Panai inilah yang menjadi pemicu penyerangan oleh kerajaan Colamandala pada tahun 1025 Masehi, sebagaimana terpahat di prasasti Tanjore Tahun 1030/ 1031 Masehi.

Penaklukan Panai oleh kerajaan Colamandala memperkuat kedudukan

Panai sebagai entitas yang masuk dalam target penguasaan kerajaan Colamandala di Asia tenggara saat itu. *Ketiga*, meskipun dikuasai oleh Kerajaan Colamandala, Panai tidak tenggelam atau hilang, bahkan terus bertahan hingga kedatangan Kerajaan Majapahit sebagai *mitra satata* seperti tertulis dalam Kitab Nagarakergama.

Melalui keseluruhan catatan historis tentang Panai tersebut tidak ditemukan penyebutan tempat ini berada dalam organisasi kerajaan. Akan tetapi kecenderungannya mengarah atau mereferensikan Panai sebagai daerah pemasok bahan baku dagang tempat para pedagang datang dan mendapatkan bahan dagangan yang menguntungkan. Barangkali bentuknya sama dengan Bandar Barus, di Lobu Tua, pesisir Barat Sumatera.

Permasalahan utama adalah sulitnya melakukan rekonstruksi sejarah atas Panai hingga saat ini, karena keterbatasan catatan yang bisa membuka ruang-ruang analisis lebih fleksibel, guna menjelaskan garis sejarah Panai. Umumnya, data yang sampai pada kita itu, terpotong dan menyulitkan untuk dianalisis lebih dalam.

Kondisi yang sama juga dialami oleh negeri-negeri sejamannya seperti, *Ilamuridesam*, *Mevilimbangan*, *Valaippanduru*, *Talaittakolam*, *Tamaralingga*, dan sebagainya. Keterbatasan itulah yang mendorong

penelitian tentang Panai dengan mengkaji berbagai literatur yang ada untuk melakukan rekonstruksi sejarah Panai dengan menyambungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya.

Tujuan penulisan ini adalah melihat kedudukan historiografi Panai berdasarkan tiga sumber tertulis di atas dan memberi perspektif baru atas kedudukan Panai sebagai sebuah kerajaan atau hanya bandar dagang.

METODE

Metode yang digunakan kualitatif – deskriptif yang disusun berdasarkan referensi, yakni: *pertama*, mengutip sumber-sumber berupa 3 (tiga) catatan asing yang kontekstual dengan judul tulisan. Selanjutnya informasi digali dan dirunutkan sesuai perodesasinya, lalu dibandingkan satu sama lain dengan tujuan memposisikan data tersebut sesuai fakta yang ditemukan.

Kedua, meskipun catatan asing menjadi petunjuk penting, keberadaan data-data arkeologis tetaplah menjadi data utama. *Ketiga*, hasil-hasil penelitian terkini terkait dengan Panai juga menjadi referensi penting.

Selanjutnya, untuk memperkuat analisis dan kesimpulan, langkah-langkah penelitian yang ditempuh dilalui dengan cara: (1) melakukan telaah catatan historis tentang Panai berdasarkan kronologisnya sesuai 3 (tiga) sumber tertulis; (2) membandingkan satu catatan dengan catatan lain sesuai dimensi

waktunya; (3) mempolakan informasi berdasarkan karakter informasinya, (4) menarik penjelasan yang simetris berdasarkan data-data yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagian bukti historis menunjukkan eksistensi Panai telah ada sebelum abad X Masehi. Di sisi yang lain tentang asal mula keberadaan Panai, diperkirakan tumbuh secara alamiah akibat meluasnya permintaan pasar terhadap komoditi rempah dan tambang yang diminati pasar internasional ketika itu. Asumsi ini didukung oleh perkembangan pelayaran global saat itu, yang rutanya semakin intensif melibatkan bandar perdagangan di pulau Sumatra dan antar pulau di Nusantara, Semenanjung Melayu, daratan Cina, India, serta Timur Tengah.

Sebelumnya pada abad IX Masehi ketika kebutuhan rempah semakin banyak juga memberi dampak pada perkembangan eksplorasi pedalaman di Bukit Barisan - Sumatra Utara. Kerajaan Sriwijaya - Palembang telah memegang kendali perdagangan internasional dan Nusantara. Aktivitas maritim dan perdagangan yang berada di tangan Sriwijaya menimbulkan kekhawatiran bagi kerajaan Colamandala di pantai Coromandel – India, sehingga melakukan penyerangan ke Sriwijaya secara bertahap. Kondisi inilah yang turut mempengaruhi keberadaan Panai di pedalaman.

Panai dalam Jangkauan Kerajaan Sriwijaya (Abad VII Masehi – XI Masehi)

Ada pemahaman umum peneliti periode klasik di Sumatra, bahwa Kerajaan Sriwijaya adalah pusat dari kekuasaan di Sumatra dari abad VII Masehi hingga abad XI Masehi. Referensi ini bermula dari hasil rekonstruksi struktur politik Sriwijaya berdasarkan prasasti-prasasti Sriwijaya, yang menggambarkan adanya pusat kekuasaan politik (*kadatuan* Sriwijaya) dengan wilayah lain sebagai pinggirannya (*mandala*) (Manguin 2014, 331-2).

Manguin (2014, 334-5) juga menggambarkan ruang sosial Sriwijaya dalam lingkup interaksi ekonomi dan politik meliputi Sumatera, Semenanjung Melayu, Jawa, Kalimantan dalam kurun abad VIII-XI Masehi. Berdasarkan sumber-sumber asing yang sezaman (Tionghoa, India, dan Arab) bahwa kegiatan ekonomi Sriwijaya menjangkau kawasan yang jauh lebih luas menjangkau hingga ke Tiongkok (timur), India, serta Teluk Persia (barat) (Manguin 2014, 335-6). Berkaitan dengan struktur regional tentang pemerintahan Sriwijaya tersebut, dimungkinkan Panai berada di bawah perlindungan Sriwijaya.

Panai memiliki referensi sebagai salah satu wilayah yang penting bagi Sriwijaya dalam hal interaksi ekonomi. Panai terkoneksi dengan Sriwijaya atas dasar kekayaan alamnya yang dibutuhkan oleh Sriwijaya. Komoditi yang dihasilkan di Panai, sama dengan komoditi rempah-rempah di Barus, seperti kamper, kemenyan, damar, dan sebagainya.

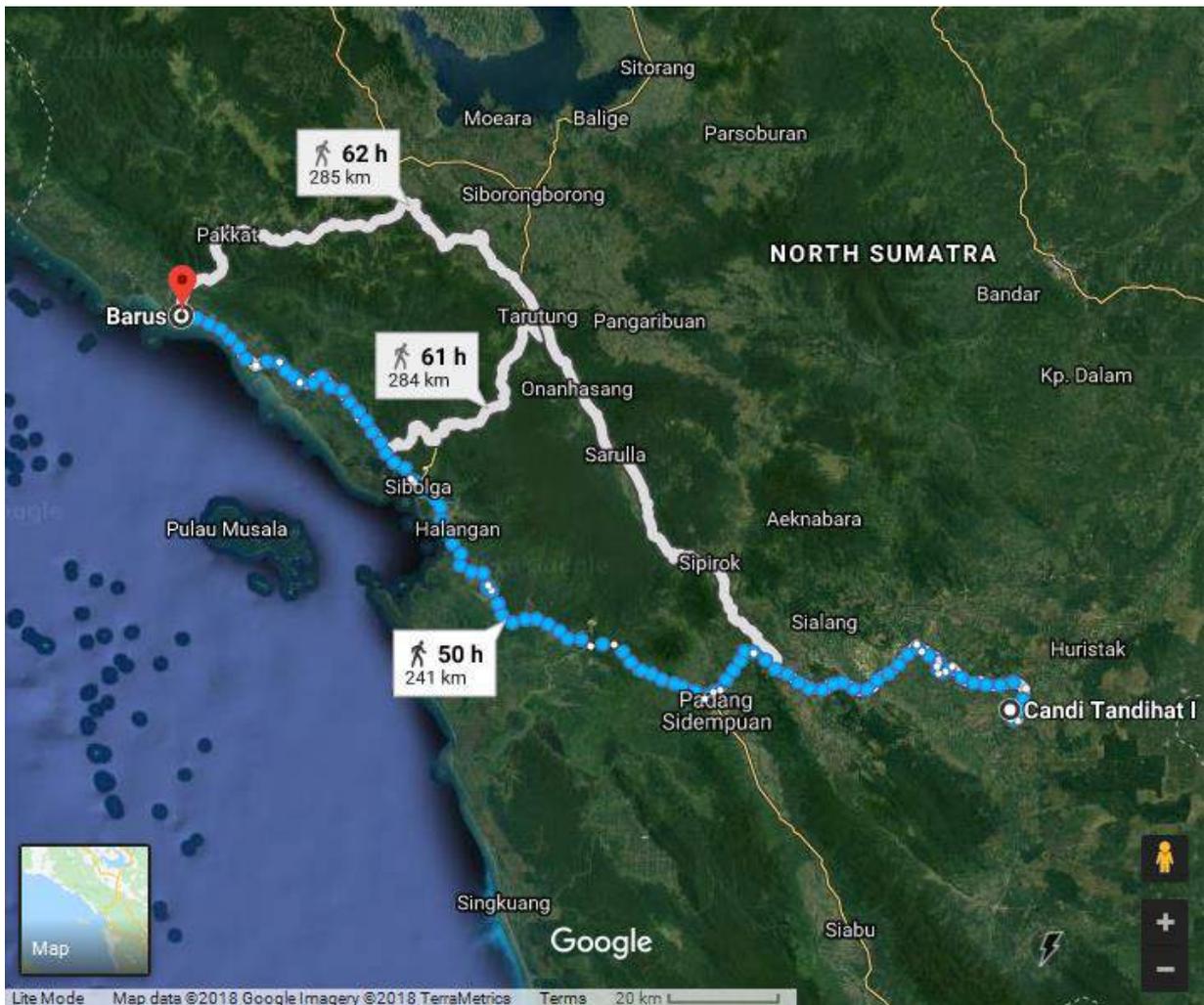
Sebelum Bandar Panai terbentuk, penduduk sekitarnya adalah suku-suku pedalaman dengan karakteristik kepemimpinan lokal yang salah satu pekerjaannya mengumpulkan hasil-hasil hutan untuk diperdagangkan dengan pendatang asing, termasuk dari pedagang Sriwijaya itu sendiri. George Coedes (1964 dalam Manguin 2017, 35) menyebutkan bahwa penduduk Asia Tenggara pada periode sebelum kedatangan anasir Hindu-Budha, orang-orang India telah berhadapan bukan dengan orang primitif yang belum berperadaban. Proses interaksi ini sendiri telah dimulai ketika pedagang-pedagang Barus terlebih dahulu mampu mencapai wilayah mereka guna mendapatkan bahan baku rempah yang semakin diminati pasar.

Guna memudahkan proses perdagangan di lingkungan hulu sungai Barumun, dibutuhkan sebuah tempat permanen yang disepakati suku-suku pedalaman untuk memudahkan proses perkembangan kegiatan ekonomi. Kemudian menjadi dasar lahirnya Panai sebagai sebuah Bandar. Sebelum terbentuknya Bandar Panai, dipercaya terlebih dahulu ada penemuan jalur baru yang menghubungkan Sriwijaya dengan Bandar Panai, dan tentu saja mengambil jalan lain dari rute kuno Barus-Barumun (Panai), tetapi melalui sungai Barumun hingga mencapai di hilir (Selat Malaka)-Sriwijaya (Palembang). Namun demikian, bisa jadi, rute tersebut telah digunakan

sebelumnya antar suku-suku pedalaman tetapi semakin berkembang penggunaannya ketika perdagangan melalui Selat Malaka semakin intensif sebelum abad XI Masehi.

Bersamaan dengan Bandar Barus di sisi Barat Sumatera, Kerajaan Sriwijaya menjadi menjadi satu-satunya kekuasaan yang menampung hasil alam bukit barisan yang kaya akan bahan-bahan rempah dan

emas. Pada bagian barat Sumatera terdapat Bandar Barus dan sisi lainnya terdapat Bandar Panai yang dihubungkan oleh Sungai Barumun yang bermuara di pantai timur Sumatera. Bandar Barus berperan sebagai jalur kuno yang juga menghubungkan suku-suku pedalaman (sebelum ada penamaan Panai) dengan para pedagang di pesisir.



Gambar 1. Jarak antara Biaro Tandihat dengan Barus (Sumber: Google Earth 2018)

Keletakan antara Panai dan Barus di pesisir barat Sumatera berjarak sekitar 241 km ke arah barat laut (lihat gambar 1). Antara kedua wilayah ini melalui

pegunungan bukit barisan yang kaya dengan produk-produk ekonomi yang dibutuhkan pasar internasional abad

pertama Masehi seperti kamper (*camphor*), kemenyan, dan damar.

Besar kemungkinan, orang-orang pedalaman sekitar Barus bekerja menyediakan bahan-bahan perdagangan seperti kamper, kemenyan, dan damar yang diperdagangkan di pelabuhan Barus, juga memperoleh bahan dagangan tersebut di sekitar Panai atau Padang Lawas saat ini.

Hal ini dapat terjadi mengingat pada abad XI Masehi, intensitas perdagangan semakin meningkat akibat besarnya permintaan pasar dari Cina, India, dan Timur Tengah. Satu bukti yang menunjukkan meningkatnya permintaan pasar atas kamper adalah semakin banyaknya pencatat asing, khususnya dari Arab dan Cina yang melaporkan keletakan negeri penghasil kamper.

Sejak lama pedagang asing mendatangi Barus seperti catatan Ibn Khordadbeh (850 M) yang mengunjungi dan menyebutkan Barus (*Fanṣūr/ Bālūs*) sebagai penghasil kamper bermutu tinggi (Stephan 2014, 259). Catatan Ibn Khordadbeh juga menyebutkan tentang deskripsi pohon serta cara memperoleh kampernya. Kamper berfungsi sebagai bahan pewangi dan obat-obatan sehingga tercatat dalam ilmu kedokteran Arab pada sekitar abad IX–X Masehi (Stéphan 2014, 263- 71).

Kembali pada rute kuno menuju Bandar Panai, diyakini untuk mencapai Panai ketika itu pedagang Sriwijaya di

Barus berhasil mencapai Panai dari jalan kuno pesisir Barat dan pada masa kemudian berhasil mendapat rute baru, rute alur sungai tepatnya dari Bandar Barus yang menghubungkannya ke pesisir Timur Sumatra.

Pemanfaatan jalur sungai itu, diperkirakan terjadi sebelum kedatangan pasukan Colamandala. Jalur tersebut memberi kemudahan transportasi hasil rempah dan tambang di pedalaman hulu sungai Barumun dan sekitarnya, dan menjangkau pasar Sriwijaya di Palembang.

Selain itu, jalur baru itu juga memicu perkembangan pemukiman sekaligus lahirnya berbagai tinggalan arkeologis berupa biaro-biaro yang tersebar di kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten padang Lawas Utara saat ini.

Panai Sebagai Sasaran Colamandala (Abad XI Masehi)

Pada tahun 1025 Masehi berkaitan dengan prasasti Tanjore, Rajendra I dari Dinasti Colamandala menyebutkan salah satu tempat yang diserang dan dikalahkan selain Sriwijaya adalah Pannai dengan “kolam airnya”. Penyebutan Pannai sebagai salah satu negeri taklukan dalam penyerbuan ke Sriwijaya ini menimbulkan dugaan bahwa kerajaan Pannai adalah salah satu negeri anggota *mandala* Sriwijaya (Sastri 1949). Pendapat lain disebutkan oleh Wheatley (1961, 199) yang menyatakan bahwa berdasarkan Prasasti Tanjore Pannai bukanlah nama

suatu kerajaan, sebab dalam bahasa Tamil, kata *pannai* berarti tanah yang diolah (sebagai lahan pertanian), jadi frasa dalam prasasti Tanjore yang berkonteks dengan kata *pannai* seharusnya bermakna tanah-tanah yang diairi dengan baik. Jadi secara tidak langsung dikatakan oleh Wheatley bahwa kepurbakalaan di Padang Lawas adalah peninggalan kerajaan Sriwijaya.

Peristilahan di atas terlihat berbeda dengan daerah lain yang diserang, karena tidak menggambarkan makna sebuah pemerintahan ataupun tempat yang kaya dalam pengertian ekonomi (sebagai penghasil kamper, kemenyan, emas). Sebutan “kolam air” lebih dekat dengan pengertian geografis dan keagamaan.

Dalam tradisi keagamaan Hindu-Budha, “kolam air” adalah bagian penting dari ritus penyucian. Air juga menjadi urat nadi kehidupan warganya sekaligus dasar dipilihnya sebagai areal pemukiman. Di India sendiri, penggunaan sungai sebagai lokasi pemukiman dapat dilihat dari histori kota Mahenjo Daro. Adapun di Nusantara, Kerajaan Sriwijaya menjadikan air atau sungai Musi sebagai urat nadi kerajaan. Begitupun Kerajaan Malayupura (Jambi) keletakannya berada di Sungai Kampar yang menjadi nadi utama kerajaan tersebut.

Kondisi yang sama juga dapat dikaitkan dengan Panai yang ditandai dengan persebaran biaro-biaro (candi) di Daerah Aliran Sungai Barumun meliputi

Batang Pane, Sirumambe, dan sungai lainnya. Persebaran biaro-biaro di sepanjang DAS Barumun mungkin sengaja dibangun pada jalan-jalan penting untuk perdagangan. Sungai Barumun pada masa lampau diduga sebagai jalur perdagangan lokal yang cukup ramai. Biaro-biaro itu antara lain kompleks biaro di Situs Gunung Tua, Si Topayan, Aek Hayuara, Tanjung Bangun, Bara, Pulo, Bahal 1, Bahal 2, Bahal 3, Pageranbira, Sangkilon, Joreng Belangah (Tandihat 1 dan Tandihat 2), dan Si Pamutung (Utomo 2010, 8; Restiyadi, Andri dkk. 2011).

Hal ini sesuai dengan istilah “kolam air” yang disebutkan dalam prasasti Tanjore yang dibuat oleh oleh penguasa Colamandala itu, diperkirakan berkaitan dengan jalur sungai Barumun yang bermuara di pesisir Timur Pulau Sumatra yang selama ini menjadi jalur kedua antara pedagang Sriwijaya-Bandar Panai.

Pada tahun 1025 M serangan Colamandala ke kerajaan Sriwijaya berhasil merebut kota dan bandar-bandar penting kerajaan tersebut. Penyerangan ini dimaksudkan untuk menguasai jaringan pelayaran perdagangan di wilayah Asia Tenggara hingga India yang sebelumnya dikuasai kerajaan Sriwijaya.

Serangan berikutnya terjadi pada tahun 1067 yang tercatat dalam Prasasti Wirarajendra Tahun 1068 Masehi, semakin melemahkan kerajaan Sriwijaya (Mustofa dkk. 2007, 6-7). Penyerangan

terhadap Sriwijaya inilah yang kemudian juga mempengaruhi kondisi Panai.

Panai dengan Kerajaan Malayupura (Abad XI Masehi)

Dikalihkannya penguasa Colamandala di Sriwijaya tahun 1079 Masehi oleh pendiri Kerajaan Malayupura (Jambi), memberi pengaruh terhadap Panai. Kekalahan Colamandala di atas, menjadi dasar historis kelanjutan

hubungan Panai dengan Kerajaan Malayupura itu sendiri (Suhadi 2012, 132-4). Dikatakan bahwa terjadinya pendudukan terhadap kerajaan *suwarnabhumi* oleh Colamandala sejak 1067 Masehi hingga sedikitnya tahun 1079 Masehi telah menjadikan kerajaan Suwarnabhumi (Sriwijaya) kekuasaannya semakin melemah, sedangkan kekuasaan Malayupura semakin menguat.



Gambar 2. Jarak tempuh antara Tandihat (Panai, Padang Lawas) dengan Muara Takus (Malayupura) (Sumber: Google Earth 2018)

Hubungan Kerajaan Malayupura dengan Panai berkaitan dengan perdagangan dan politik. Sebagian ahli berpendapat bahwa Kerajaan Malayupura juga mempengaruhi konsepsi keagamaan di Panai, sebagaimana terlihat dari peninggalan kompleks permandian yang terdapat di Panai antara abad XI Masehi hingga abad XIV Masehi. Pengaruh ini dimungkinkan karena secara geografis antara permandian di Panai (Tandihat) dengan Muara Takus (Melayupura) berjarak sekitar 112 km ke arah tenggara (lihat gambar 2). Candi Muara Takus (Kabupaten Kampar) merupakan salah satu kompleks permandian pada masa Kerajaan Malayupura, selain kompleks permandian Muaro Jambi (Kabupaten Batanghari, Jambi) (Suhadi, 2012, 137).

Panai dengan Kerajaan Majapahit (Abad XIV Masehi)

Sebagian ahli menyebut Panai sebagai salah satu wilayah yang berada dalam jangkauan Kerajaan Majapahit karena tercatat dalam Kitab Nagarakertagama pupuh XIII bait 1, karena *Pane* bersama dengan nama wilayah lain di Sumatera dimasukkan sebagai wilayah yang ditafsir memberi upeti kepada Kerajaan Majapahit.

Dalam pemaknaan yang berbeda, Hasan Djafar (2002, 191-2) menyebut *Pane* atau Panai serta daerah-daerah lain yang disebutkan dalam Nagarakertagama berada di luar kekuasaan Majapahit. Hasan Djafar juga menyebutkan bahwa

terdapat hubungan antara Majapahit dengan wilayah-wilayah lain sebagai *mitra satata* (sahabat dalam kedudukan yang sama). Berdasar uraian *Nagarakertagama*, Majapahit memang punya tradisi mengadakan suatu pesta besar setiap tahunnya. Seluruh penguasa wilayah-wilayah kerajaan itu diundang dan ada yang memberikan hadiah-hadiah kepada raja Majapahit (Agmasari ed. 2013, <http://nationalgeographic.grid.id/read/13285443>).

Sebagai kerajaan adikuasa setelah zaman Sriwijaya berakhir, Majapahit tetap berkepentingan dengan wilayah kerajaan-kerajaan itu sebagai daerah tujuan pemasaran dan sebagai penghasil sumber daya alam yang berpotensi perdagangan. Ini adalah hubungan kepentingan bersama sehingga Majapahit juga berkepentingan untuk mengamankan dan melindungi wilayah-wilayah itu (Agmasari ed. 2013,).

Dapat dikatakan hubungan antara Panai dan Majapahit dalam dimensi relasi diplomatik dua wilayah yang secara bilateral saling mengakui satu sama lain. Yaitu, sebuah relasi yang sangat mungkin Kerajaan Majapahit mengukuhkan Panai sebagai sekutu potensialnya karena mengingat kekayaan alam Panai dipercaya bisa menyokong pertumbuhan ekonomi dan kebesaran Kerajaan Majapahit. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa tidak hanya sebagai bandar, Panai juga merupakan

wilayah kerajaan tersendiri yang memiliki penguasa.

Kesamaan keagamaan antara Panai dan Majapahit (Hindu-Budha) juga menegaskan bahwa relasi keduanya, tidaklah berdasarkan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukan, melainkan relasi ekonomi-keagamaan yang berkontribusi positif pada komunikasi diplomatik keduanya.

Pada masa yang sama, Bandar Barus juga masih beraktivitas dan dipastikan turut menjalin relasi dengan Kerajaan Majapahit pada abad XIV Masehi. Dan, beberapa tempat lain di Sumatra yang melakukan kontak dengan kerajaan Majapahit pada abad XIV Masehi, antara lain: *Lamuri* (Aceh), *Samudera* (Aceh), *Perlak* (Aceh), *Tumihang* (Aceh), *Lwes* (Aceh ?), *Barat* (Aceh), *Haru* (Sumatra Utara), *Barus* (Sumatra Utara), *Mandahiling* (Sumatra Utara), *Rakan* (Riau), *Minangkabau* (Sumatra Barat), *Kampe*, *Kampar*, *Siyak*, *Kahwas*, *Dharmasraya*, *Kandis*, *Karitan*, *Teba*, *Jambi*, *Palembang* dan *Lampuh* (Djafar 2002, 191-2).

Panai dengan Islam (Abad XIV Masehi-XVII Masehi)

Sebelum Panai kontak dengan Kerajaan Majapahit (1365 Masehi), dipercaya pedagang Islam terlebih telah menyentuh kehidupan di Bandar Panai. Pedagang Islam yang berasal dari Arab telah hadir semenjak abad VII Masehi saat Kerajaan Sriwijaya di masa puncaknya.

Tetapi, kontak antara Islam dan Panai, diyakini berkelanjutan terjadi pada era memudarnya pengaruh Hindu-Budha di Panai atau bersamaan semakin kuatnya kedatangan pedagang Islam di Pulau Sumatra pada abad XIII hingga abad XIV Masehi.

Adapun jejak Islam yang kuat di Sumatra ditemukan pada nisan Sultan Malikussaleh, Sultan pertama Kesultanan Samudera Pasai (Aceh). Patut di duga, pemerintahan Islam di Samudera Pasai melakukan kontak dengan Bandar Panai mengingat kedudukan pasar Sriwijaya yang telah berkurang peranannya berpindah kepada Kesultanan Malaka dan Kesultanan Samudera Pasai. Pada masa Kesultanan Nangroe Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1603-1636 Masehi), menyebut *Pani* (Panai) sebagai jajahan Aceh (Kevonian 2014, 87).

Panai sebagai Sumber Bahan Baku Perdagangan Kerajaan Sriwijaya, Malayupura, Colamandala, Majapahit, Kesultanan Samudera Pasai dan Kesultanan Aceh

Penduduk di pedalaman Barus hingga Panai memperoleh berbagai material perdagangan yang laku di pasar internasional Sriwijaya di pedalaman Sumatra bagian Utara. Bukit barisan yang menjadi pusat ekosistem bahan-bahan perdagangan ini menjadi tanah alamiah yang menyokong tumbuh dan berkembangnya tanaman-tanaman ekonomis yang dibutuhkan pasar

internasional pada masa Sriwijaya berkuasa hingga kedatangan pendudukan dari Dinasti Colamandala pada abad XI Masehi.

Penduduk di Panai ketika itu dipercaya merupakan jaringan suku-suku pedalaman yang telah hidup dan menetap di ekosistem hutan pegunungan bukit barisan yang usianya cukup tua (barangkali satu level dengan penduduk di Pasemah, Ulu Musi, dan Kerinci). Mereka mengembangkan sistem kehidupan berladang yang sederhana tetapi telah melakukan kontak dengan pedagang-pedagang luar yang membutuhkan bahan-bahan baku perdagangan seperti damar, kemenyan, kamper dan sebagainya.

Penduduk di Panai mendiami tepi-tepi sungai dan menjadikannya sebagai pusat pemukiman sekaligus pusat ekonomi yang mendukung kekuasaan-kekuasaan yang lebih besar saat itu, seperti Kerajaan Sriwijaya. Ini adalah kompleksitas hubungan antara hulu-hilir yang dialami masyarakat Panai ketika itu. Seperti halnya penduduk di Pasemah, Ulu Musi, dan Kerinci pada akhir masa prasejarah dan pada masa protosejarah telah didiami masyarakat yang kompleks yang memiliki akses terhadap barang mancanegara seperti perunggu Dong Son dan manik-manik samudera Hindia.

Dapat dipastikan, kedudukan suku-suku di hulu Barumun dan sekitarnya menjadi penyokong utama pemenuhan kebutuhan untuk banda-bandar Sriwijaya

yang ada di Barus dan Palembang. Dan pada masa yang lebih dekat dengan kedatangan Colamandala, kemungkinan ada peningkatan status yang diberikan oleh Sriwijaya sehingga menjadikan penduduk di Panai tidak lagi menjadi penyedia perdagangan ke Barus, melainkan memiliki bandarnya sendiri bernama Panai (*P'anes*).

Colamandala Menggunakan Rute Pesisir Timur - Sungai Barumun Hulu untuk Menaklukan Panai

Metamorfosis Panai dari penyedia barang untuk bandar di Barus hingga memiliki bandarnya sendiri, diyakni sangat dipengaruhi dari dinamika sosial, politik, ekonomi Kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Pada masa yang menguntungkan tersebut, Panai berubah dari sumber bahan baku bagi pelabuhan di Barus menjadi tempat utama pengumpulan hasil-hasil hutan, tambang, pertanian sekaligus menjadi pasar atau tempat berkumpulnya barang-barang dari luar yang dibutuhkan oleh penduduknya, seperti, hasil-hasil laut, dan barang-barang kebutuhan warga lainnya. Metamorphosis ini mendorong perkembangan okupasi pesisir sungai dari hulu hingga hilir yang menghubungkan hulu Barumun dengan anak sungainya (sungai Kanan, Batang Pane, Sihapas, Sungai Aek Sangkilon) hingga bermuara di pantai timur Sumatra di Labuhan Bilik, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Jalur sungai itu telah menjadikan Panai menjadi lebih mandiri mengelola kekayaan alamnya, dan menjadi bandar

yang lebih terbuka dari kedatangan orang-orang asing. Kemungkinan pasukan Colamandala, juga turut menggunakan jalur sungai tersebut.

Kedudukan Panai bagi Colamandala dan Majapahit bukanlah dalam artinya kedudukan militer. Melainkan lebih cenderung pada kekayaan alam yang dimilikinya yang dipercaya

dapat menopang kemakmuran negerinya. Kekayaan Panai dari sumberdaya alam telah terbukti memberi banyak kekayaan material kerajaan Sriwijaya pada masa lampau. Kondisi ini sangat menguntungkan secara ekonomis bagi Colamandala maupun Majapahit.



Gambar 3. Aktivitas penambangan emas secara tradisional di Hulu sungai Barumum, Padang Lawas (Dokumentasi. BPCB 2017)

Arti Penting Bandar Panai Bagi Sriwijaya, Malayapura, Colamandala dan Majapahit

Panai sangat berperan penting bagi kerajaan Sriwijaya, Malayapura, Colamandala dan kerajaan Majapahit. Hal ini tidak dapat disangkal mengingat kontribusi kekayaan alam Panai berfungsi sebagai penyangga kemakmuran dan

kemashuran kerajan-kerajan tersebut di atas.

Dari aspek militer, Panai dan kekayaan alamnya seperti emas, kemenyan, kamper adalah modal ekonomi yang menjadi stimulus perdagangan barang-barang tambang untuk keperluan militer. Dari aspek ekonomi, Panai menyediakan logam mulia yang mendorong daya tahan perekonomian

kerajaan sehingga mampu memperkuat pertumbuhan belanja kerajaan dan mendorong kemakmurannya melalui bekerja mata rantai ekonomi rakyatnya.

Melalui aspek keagamaan, Panai pernah menjadi pusat belajar keagamaan Budha yang didukung oleh berbagai kekuatan besar, seperti Kerajaan Malayupura, Kerajaan Colamandala hingga Kerajaan Majapahit. Ini dibuktikan dengan banyaknya bangunan-bangunan biaro (candi) yang dibangun di wilayah Panai saat itu (Padang Lawas dan Padang Lawas Utara) (Utomo 2013).

Ketiga aspek di atas menjadi satu kesatuan yang menjelaskan nilai penting Panai sebagai salah satu pilar besar yang menyokong kehidupan kerajaan-kerajaan tersebut. Ketiga aspek tersebut juga menjadi penyebab Panai menjadi incaran untuk ditaklukan hingga dikuasai untuk diambil kekayaannya.

KESIMPULAN

Panai adalah penamaan kuno untuk keletakan lokasi bandar dagang di kawasan Padang Lawas (Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara). Evolusi Bandar Panai dari penyokong komoditi perdagangan bandar Barus hingga memiliki bandarnya sendiri, menunjukkan kemampuan fleksibilitas penduduk Panai terhadap perubahan-perubahan politik, militer, ekonomi dan keagamaan di lingkungan regional Kerajaan Sriwijaya di Palembang,

Malayupura di Jambi hingga Colamandala dan Majapahit di pulau Jawa.

Kekayaan alam Panai dan kemampuan adaptasi penduduknya dari satu kekuasaan ke kekuasaan lain para periode Hindu-Budha di Nusantara, menunjukkan sisi kecerdasan adaptif, yang pada akhirnya menjadi salah satu karakteristik penduduk Panai, sehingga mampu memiliki bandarnya sendiri. Alhasil, Panai berkembang di setiap episode kekuasaan kerajaan mulai dari Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Malayupura, Kerajaan Colamandala hingga Kerajaan Majapahit meliputi rentang waktu dari abad VII Masehi hingga abad XIV Masehi.

Berkaitan dengan hal tersebut, kesimpulan utama yang bisa ditarik bahwa ada banyak nilai penting kesejarahan yang dapat diakses dari catatan-catatan tentang Panai bagi kita saat ini. Seperti, *pertama*, penduduk lokal di Panai merupakan penduduk suku yang memahami dinamika kebutuhan pasar internasional saat itu.

Kedua, penduduk bandar Panai mengembangkan dirinya sendiri bersama kemampuan mendiplomasi kekayaan alamnya kepada kerajaan-kerajaan besar sehingga mendapatkan Bandar dagangnya sendiri dan pada akhirnya mampu membentuk jaringan perdagangannya secara mandiri dengan menghubungkan Panai atas pusat kekuasaan di Sriwijaya, Malayupura, Colamandala hingga Majapahit.

Ketiga, Bandar Panai adalah pelabuhan kuno yang tidak berfokus membangun kekuatan militernya melainkan mengembangkan bandarnya sebagai pusat perdagangan utama di Pulau Sumatra, bersifat terbuka dan tidak mengarahkan dirinya membentuk kekuatan militer tetapi memilih mengutamakan relasi ekonomi-keagamaan sebagai kekuatannya. Di sisi lain kerajaan Sriwijaya dan Malayapura tidak menerapkan struktur pemerintahan sebagai penguasa dan bawahan, melainkan menganggap negeri lain sebagai *mandala* yang memiliki *datu/* raja, *wanua/* wilayah otonomi sendiri.

Hal yang sama terjadi pada saat Kerajaan Colamandala menaklukan Panai, dimana tidak menggelarinya sebagai tempat yang memiliki kekuatan perang yang dahsyat tetapi menggelarinya dengan sebutan “kolam air.” Begitupun Kerajaan Majapahit, baginya Panai hanyalah mitra penting bagi ekonomi kerajaan Majapahit. Dengan demikian Majapahit menyetarakan Panai sebagai kerajaan *mitra satata* (sahabat dalam kedudukan yang sama) dalam kegiatan perekonomian dan keagamaan. Kesimpulannya Panai selain sebagai bandar perdagangan juga berkembang sebagai kerajaan dengan penguasa setempat yang diakui oleh Sriwijaya, Malayapura, Colamandala, dan Majapahit.

DAFTAR PUSTAKA

- Agmasari, Silvita ed. 2013. “Nusantara Bukanlah Wilayah Majapahit ?” <http://nationalgeographic.grid.id/read/13285443>.
- Avramian R. 1958. “Suatu Catatan perjalanan dalam bahasa Armenia tentang India pada Abad ke-12 Masehi”, *Bander Mataderani*. Erevan 4, hlm. 317-28.
- Djafar, Hasan. 2002. *Masa Akhir Majapahit. Girindrawardhana & Masalahnya*. Cetakan ke-2. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Kevonian, Keram. 2014. “Suatu Catatan Perjalanan di Laut Cina dalam Bahasa Armenia”. *Lobu Tua Sejarah Awal Barus*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Manguin, Pierre-Yves. 2014. “Sifat Amrof Politi-Politi Pesisir”. *Kedatuan Sriwijaya*, George Coedes ed. Edisi kedua. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Mustofa, Habib, dkk. 2007. *Sejarah SMA*. Penerbit: Yudistira.
- Restiyadi, Andri, Ery Soedewo, Erond Damanik, Khairunnisa, Bilater Situngkir. 2011. Penelitian Situs Dunia di Sumatera Utara: Situs Candi di Padang Lawas, Tinggalan Arkeologi Masa Hindu-Buddha di Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara
- Sastri, K.A.N. 1949. *History of Sri Vijaya*. University of Madras [/https://id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org)
- Stéphan, Nouha. 2014. “Kamper dalam Sumber Arab dan Persia: Produksi dan Penggunaannya”. *Lobu Tua Sejarah Awal Barus*. Claude Guillot

- ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 257-82.
- Suhadi, Machi 2012. "Kerajaan Panai". *Indonesia Dalam Arus Sejarah*.
- Tim Redaksi. 2013. *Kitab Negara kertagama Terjemahan*. Yogyakarta: Cetta Media.
- Utomo, Bambang Budi, 2010. *Atlas Sejarah Indonesia Masa Klasik (Hindu-Buddha)*. Jakarta: Dirjen Sejarah dan Purbakala, Direktorat Geografi Sejarah.
- _____.2012. *Percandian Padanglawas. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional*.
- Weathley, Paul, 1961. *The Golden Khersonese Studies in The Historical Geography of The Malay Peninsula Before A.D. 1500*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press